

## **EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA GEMBA RAYA DI KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG**

**Oleh:**  
**DOROTEUS MARTYAN**  
**NIM. E42010034**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat  
E-mail : [tm07032010@gmail.com](mailto:tm07032010@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mendeskripsikan dampak kebijakan pemekaran Desa Gemba Raya di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan subjek penelitian yaitu Camat Kelam Permai, Kasi Pemerintahan, Kepala Desa, Kaur Pemerintahan dan Kesra, Panitia Pemekaran dan Masyarakat Desa Gemba Raya. Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak positif dari kebijakan pemekaran desa berupa kelancaran pada proses pelayanan publik dan perbaikan infrastruktur sehingga perekonomian masyarakat meningkat dan kehidupan lebih sejahtera. Adapun dampak negatif berupa permasalahan umum mengenai batas wilayah dan tingkah laku masyarakat seperti timbulnya persaingan yang buruk akibat rasa iri terhadap desa pemekaran. Rekomendasi dari penelitian ini pada sektor pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pembangunan infrastruktur harus dipertahankan. Pemerintah Desa Gemba Raya dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Pelimping dalam menangani permasalahan umum mengenai batas wilayah dan tingkah laku masyarakat untuk memperoleh solusi terbaik.

Kata-kata kunci : Dampak, Pemekaran Desa, Pelayanan dan Pembangunan.

## ABSTRACT

**Doroteus Martyan:** The Evaluation of Expansion Policy of Gemba Raya Village, Kelam Permai Sub-district, Sintang Regency. **Essay. Pontianak: Science of Government Program, Faculty of Social and Political Science, Tanjungpura University in cooperation with The Government of West Kalimantan Province.** The purpose of this essay are to identify and describe the impact of expansion policy in Gemba Raya village, Kelam Permai sub-district, Sintang regency. This research is an descriptive of qualitative model and the subjects of this research consist of the head of Kelam Permai sub-district, Section chief of government in Kelam Permai Sub-district, The head of Gemba Raya village, the chief of people's welfare affairs and government major, the expansion committee and the population of Gemba Raya village. The research result shows the positive impact of village expansion policy such as the fluency in public service process and the infrastructure improvement so it increase the economy of the population around it and increase their prosperous. In the other side, there are also the negative impact because of it that consist of the general problem about the boundaries and the attitude of the people around it, they tendence to be jealous because of the village expansion. The recommendation from this research in public service sector, especially in population administration major and infrastructure improvement must be maintenanced. The government of Gemba Raya village can coordinate with the government of Pelimping village to solve the problem related with the boundaries and the attitude of the people around it then find the best solution above all.

Keywords : Impact, Village Expansion, Service and Developement.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk konkrit dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Dengan kata lain, hakikat pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran wilayah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah.

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Dalam Undang-Undang nomor 32

tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa : “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh dan mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau

desentralisasi. Otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat. Jadi istilah "otonomi desa" lebih tepat bila diubah menjadi "otonomi masyarakat desa" berarti kemampuan yang benar-benar tumbuh dari masyarakat desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan, pada bab 2 pasal (2) disebutkan bahwa : "Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat". Pembentukan desa atau pemekaran desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan desa yang lebih efektif dan efisien.

Desa Gemba Raya merupakan salah satu desa pemekaran yang ada di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Desa ini dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 7 tahun 2007 tentang pemekaran desa di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang tahun 2012, desa dengan luas wilayah 51 Km<sup>2</sup> ini memiliki 4 buah dusun dengan jumlah penduduk 941 jiwa, dimana tingkat kepadatan penduduknya rata-rata 18 jiwa per Km<sup>2</sup> atau 235 jiwa per dusun.

Kondisi Desa Gemba Raya sebelum dimekarkan dari desa induknya yaitu Desa Pelimping sangat menyulitkan bagi pemerintah desa dan masyarakat desa. Wilayah desa yang terlalu luas membuat kawasan-kawasan desa menjadi terpencar sehingga mempersulit rentang kendali pemerintah desa. Faktor kewilayahan ini juga menjadi suatu penghambat dalam proses pemerataan pembangunan karena pemerintah desa kesulitan untuk menjangkau keseluruhan wilayah

desa dengan kondisi wilayah yang luas serta kawasan-kawasan desa yang terpencar.

Selain itu, masyarakat desa juga mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan pemerintah desa dalam berbagai urusan dan keperluan yang disebabkan oleh faktor geografis seperti jarak tempuh antar dusun dengan pusat desa yang terlalu jauh dan kondisi jalan yang kurang baik sehingga sulit untuk dijangkau. Jumlah penduduk yang cukup banyak juga menuntut pada kualitas pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentu menjadi suatu masalah bagi pemerintah Desa Pelimping, sehingga dibentuklah Desa Gemba Raya pada tahun 2007 sebagai solusi dari permasalahan ini.

Melalui kebijakan pemekaran Desa Gemba Raya telah mempersempit wilayah Desa Pelimping sehingga rentang kendali pemerintah desa dapat terjangkau ke seluruh wilayah desa. Dengan demikian, maka proses pemerataan pembangunan di Desa Pelimping maupun di Desa Gemba Raya menjadi lebih mudah. Selain itu,

dengan adanya Desa Gemba Raya telah menghimpun kawasan-kawasan desa yang awalnya terpencar menjadi terpusat ke dalam masing-masing desa. Dengan kondisi kawasan-kawasan desa yang telah terpusat ke dalam masing-masing desa tersebut membuat pemerintah desa menjadi lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat desa. Jumlah penduduk dan luas wilayah desa yang telah diperkecil dan di persempit melalui kebijakan pemekaran desa ini juga semakin mempermudah pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan desa yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pemekaran desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 7 tahun 2007.

Data hasil olahan penulis menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran Desa Gemba Raya juga

telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat desa. Faktor geografis seperti jarak tempuh antar dusun dengan pusat desa yang terlalu jauh, bukanlah suatu masalah lagi bagi masyarakat desa karena jarak tempuh antar dusun dengan pusat desa sejak adanya Desa Gemba Raya menjadi lebih dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat desa. Adanya Desa Gemba Raya juga telah mempermudah masyarakat desa untuk berinteraksi dengan pemerintah desa dalam berbagai urusan dan keperluan.

Kondisi Desa Gemba Raya saat ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisinya sebelum pemekaran. Pada sektor pelayanan, pemerintah desa memiliki rentang kendali yang terjangkau ke seluruh wilayah desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Sedangkan pada sektor infrastruktur, kawasan-kawasan desa yang awalnya terpencar menjadi terpusat di dalam masing-masing desa sehingga mempermudah proses pemerataan

pembangunan. Jarak tempuh antar dusun dengan pusat desa juga menjadi lebih dekat sehingga memudahkan masyarakat desa untuk berinteraksi dengan pemerintah desa dalam berbagai urusan dan keperluan.

## **2. Rumusan Permasalahan**

Setelah diuraikan dalam Latar Belakang dan Fokus Penelitian, dapat dirumuskan permasalahannya yakni : "Bagaimana dampak kebijakan pemekaran wilayah pada sektor pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pembangunan infrastruktur Desa Gemba Raya di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang?"

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang, Fokus Penelitian, dan Rumusan Permasalahan, adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan pemekaran Desa Gemba Raya di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang pada sektor :

- 1) Pelayanan Publik bidang Administrasi Kependudukan.
- 2) Pembangunan Infrastruktur.

#### 4. Manfaat Penelitian.

##### 1) Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu pemerintahan yang terkait dengan evaluasi kebijakan serta dapat menjadi salah satu referensi dalam penelitian yang sejenis untuk menambah kepastakaan.

##### 2) Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku penyelenggara pemerintahan khususnya bagi pemerintahan daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara sekaligus sebagai abdi masyarakat sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan selanjutnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

#### B. TEORI DAN METODOLOGI

##### 1. Teori

##### 1) Kebijakan Publik

Ruang lingkup studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor kehidupan masyarakat. Kebijakan publik dapat di pandang sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional (Nugroho, 2004:51). Menurut Easton (dalam Islamy, 2003:19) kebijakan publik merupakan pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Selanjutnya, menurut Nugroho (2008:55) kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.

Putra (2003:84) mengatakan bahwa dalam proses suatu kebijakan publik perlu juga untuk memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial

yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat sehingga pada akhirnya mencapai hasil yang diharapkan ataupun dampak yang tidak diharapkan. Kemudian, Dunn (2000:22) mengatakan bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penelitian kebijakan.

Sebuah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah wajib untuk diimplementasikan agar tujuan atau sasaran dapat tercapai karena fungsi implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijaksanaan negara diwujudkan sebagai *outcome* (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah

(Wahab, 1990:123). Menurut Nugroho (2004:183) bahwa sebuah kebijakan tidak bisa dilepaskan begitu saja, kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakan.

## 2) Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan (Subarsono, 2008:119). Evaluasi baru dapat dilakukan apabila suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Untuk dapat mengetahui *outcome*, dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, katakanlah 5 tahun sejak kebijakan itu diimplementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu cepat, maka *outcome* dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Sementara itu, Jones (dalam Widodo, 2010:124) menjelaskan evaluasi kebijakan lebih operasional yaitu sebagai suatu aktivitas

yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya.

Rossi dan Freeman (dalam Pasolong, 2008:60) Evaluasi tidak hanya berguna untuk menjustifikasikan kegunaan dari program yang sedang berjalan, tetapi juga untuk melihat kegunaan program dan inisiatif baru peningkatan efektifitas manajemen dan administrasi program, dan mempertanggungjawabkan hasil kepada pihak yang mensponsori program tersebut. Menurut Patton (2009:30) evaluasi dimaksudkan untuk menguraikan dan memahami dinamika internal berjalannya suatu program. Evaluasi berimplikasi pada penekanan dalam melihat bagaimana hasil atau keluaran itu

dihasilkan daripada hanya melihat hasilnya semata. Itulah, suatu analisis proses dengan mana suatu program membuahkan hasil. Proses evaluasi itu berkembang, deskriptif, berkesinambungan, luwes dan induktif.

Evaluasi bertujuan mencari kekurangan dari suatu kebijakan, kemudian menutupi kekurangan dari kebijakan tersebut. Selanjutnya Evaluasi merupakan upaya untuk mengetahui suatu kebijakan itu berhasil atau tidak, dan merupakan salah satu tahapan dalam siklus kebijakan. Fungsi evaluasi menurut Luankali (2007:93) adalah :

1. Memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kinerja kebijakan (kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai via tindakan publik). Sebenarnya tujuan-tujuan tertentu (%) telah dicapai.
2. Memberi sumbangan klarifikasi dan kritik

terhadap nilai-nilai yang mendasar dari pemilihan tujuan dan target.

Selanjutnya, Badjuri dan Yuwono (2003:132) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk memenuhi 3 tujuan utama, yaitu :

1. Menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuan.
2. Menunjukkan akuntabilitas pelaksanaan publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan.
3. Memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Menurut Dunn (dalam Agustino, 2006:187-188) salah satu fungsi dari evaluasi kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan harus bisa memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Pada bagian ini, seorang evaluator harus bisa

memberdayakan *output* dan *outcomes* yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan.

*Outcomes* adalah sesuatu yang lebih memfokuskan atau mencoba untuk menentukan pengaruh dari kebijakan dalam kondisi kehidupan yang sesungguhnya. Ketika berbicara tentang *outcomes* dalam mengevaluasi sebuah kebijakan, mengharuskan kita untuk mengetahui apa sasaran utama dari kebijakan yang dikeluarkan (objektifitas kebijakan), bagaimana implementasinya (program), dan jika ada, apa yang harus di kerjakan terhadap hasil yang dicapai oleh objeknya (dampak atau hasil dan hubungannya dengan kebijakan itu). Wajar apabila dalam mengukur keberhasilan perlu menentukan tidak hanya beberapa perubahan pada kondisi kehidupan yang terjadi sesungguhnya, seperti pengurangan jumlah pengangguran, tetapi juga

sudah menjadi kewajiban para *decision maker* untuk melihat dampak dari formulasi kebijakan yang diimplementasikan (Agustino, 2006:191).

Pengukuran dalam evaluasi bervariasi. Secara umum evaluasi kebijakan mengacu pada empat indikator. Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan daerah menurut Badjuri dan Yuwono (dalam Nurcholis, 2007:278) yaitu :

1. Aspek *Input*, fokus penilaian atau indikatornya adalah:
  - Apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan memadai?
  - Berapakah SDM, uang, infrastruktur pendukung lain yang diperlukan?
2. Aspek *Proses*, fokus penilaian atau indikatornya adalah:

- Bagaimanakah sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat?

- Bagaimanakah efektivitas dan efisiensi metode yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut?

3. Aspek *Output*, fokus penilaian atau indikatornya adalah:

- Apakah hasil atau produk yang dihasilkan dari sebuah kebijakan publik?
- Berapa orang yang berhasil mengikuti program atau kebijakan tersebut?

4. Aspek *Outcomes*, fokus penilaian atau indikatornya adalah:

- Apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan?

- Berapa banyak dampak positif yang dihasilkan?
- Adakah dampak negatifnya? Seberapa dampak negatif tersebut?

Dari beberapa indikator penilaian evaluasi terhadap kebijakan yang dikemukakan oleh para pakar, penulis menggunakan indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Badjuri dan Yuwono. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator atau kriteria evaluasi pada aspek *Outcomes* (dampak) dari suatu kebijakan untuk mengetahui dampak kebijakan pemekaran wilayah pada sektor pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pembangunan infrastruktur Desa Gemba Raya di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif

yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana dampak kebijakan pemekaran wilayah pada sektor pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pembangunan infrastruktur Desa Gemba Raya. Pendekatan Kualitatif dipilih agar dapat mengidentifikasi serta menganalisis dampak kebijakan pemekaran Desa Gemba Raya. Lokasi penelitian adalah Desa Gemba Raya di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Subjek penelitian yaitu Camat Kelam Permai, Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Camat Kelam Permai, Kepala Desa Gemba Raya, Kepala Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Kantor Desa Gemba Raya, Panitia Pemekaran Desa Gemba Raya dan Masyarakat Desa Gemba Raya sebanyak 4 (empat) orang. Dalam kegiatan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **1. Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Gemba Raya di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang**

Berdasarkan hasil penelitian selama di lapangan menunjukkan bahwa sektor pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Desa Gemba Raya sudah cukup baik dan sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari kesiapsiagaan aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan serta tingkat antusias masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan. Pembangunan infrastruktur Desa Gemba Raya juga sudah cukup baik dan maju. Hal ini terlihat dari kondisi jalan yang membuat masyarakat merasa sangat terbantu dalam bekerja contohnya pergi ke kebun maupun mengangkut dan menjual hasil perkebunannya menjadi lebih mudah dan nyaman sehingga perekonomian masyarakat semakin meningkat.

### **2. Dampak Positif dari Kebijakan Pemekaran Desa Gemba Raya di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang**

Berdasarkan hasil observasi, wawancara terhadap seluruh informan dan dokumentasi selama melakukan penelitian di lapangan, adapun dampak positif dari kebijakan pemekaran Desa Gemba Raya di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- 1) Memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan dan pembangunan lebih merata dan terjangkau ke seluruh wilayah.
- 2) Pelaksanaan kegiatan – kegiatan pemerintah lebih terkontrol.
- 3) Kelancaran pada proses pelayanan publik.
- 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan.
- 5) Perbaikan pembangunan infrastruktur.
- 6) Meningkatnya perekonomian masyarakat sehingga kehidupan lebih sejahtera.

### **3. Dampak Negatif dari Kebijakan Pemekaran Desa**

## **Gemba Raya di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang**

Berdasarkan hasil observasi, wawancara terhadap seluruh informan dan dokumentasi selama melakukan penelitian di lapangan, adapun dampak positif dari kebijakan pemekaran Desa Gemba Raya di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- 1) Timbulnya permasalahan – permasalahan umum mengenai batas wilayah.
- 2) Timbulnya perasaan iri dari masyarakat desa induk pemekaran terhadap masyarakat desa pemekaran.
- 3) Adanya sebagian masyarakat yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.

### **D. SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN**

#### **1. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab V tentang hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pemekaran Desa Gemba Raya di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang telah terlaksana dengan baik. Adanya pembangunan berupa jalan dan kantor desa melalui bantuan pemerintah telah memberikan dampak yang positif pada perkembangan kegiatan pelayanan publik khususnya bidang administrasi kependudukan dan pembangunan infrastruktur.
- 2) Pada sektor pelayanan publik bidang administrasi kependudukan, melalui pemekaran Desa Gemba Raya telah mempersempit rentang kendali pemerintahan dari 8 buah Dusun menjadi 4 buah Dusun sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih optimal. Selanjutnya pada sektor pembangunan infrastruktur desa, melalui pemekaran Desa Gemba Raya membuat pembangunan menjadi lebih baik. Dengan

rentang kendali pemerintahan yang sempit maka pembangunan lebih merata. Pembangunan infrastruktur seperti jalan di Desa Gemba Raya telah memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam bekerja sehingga perekonomian semakin meningkat dan kesejahteraan masyarakat semakin baik.

3) Pemekaran Desa Gemba Raya di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang menimbulkan sedikit dampak negatif berupa persaingan antara desa pemekaran dengan desa induk pemekaran. Adanya pemekaran Desa Gemba Raya menimbulkan kecemburuan sosial pada masyarakat di desa induknya yakni Desa Pelimping dalam berbagai sektor, baik itu dari sektor pelayanan publik bidang administrasi kependudukan maupun sektor pembangunan infrastruktur desa sehingga masyarakat di desa induk pemekaran

memiliki suatu nilai perbandingan antara desa pemekaran dengan desa induk pemekaran. Namun, dampak negatif ini bukanlah suatu hambatan yang berarti bagi Desa Gemba Raya sehingga pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dapat terlaksana dengan optimal dan pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar.

## 2. Saran

Berdasarkan seluruh hasil penelitian serta kesimpulan, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1) Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemekaran Desa Gemba Raya di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang telah terlaksana dengan baik. Prestasi ini harus dipertahankan dan terus ditingkatkan lagi oleh pemerintah Desa Gemba Raya demi kemajuan Desa Gemba Raya.

- 2) Pemerintah Desa Gemba Raya dan Pemerintah Desa Pelimping dapat saling bekerjasama serta saling berkoordinasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya pada sektor pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi rasa kecemburuan sosial pada masyarakat di desa induk pemekaran.
- 3) Pemerintah Desa Gemba Raya perlu mengikutsertakan aparatur pemerintah desanya dalam pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan sumberdaya aparatur pemerintah desa menjadi lebih baik sehingga pelayanan publik khususnya bidang administrasi kependudukan dan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan lebih optimal.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Sebagian data yang ada di Desa Gemba Raya belum diperbaharui sehingga beberapa data tidak dapat ditampilkan. Keterbatasan ini menjadi kendala tersendiri bagi penulis dalam mengidentifikasi pemekaran Desa Gemba Raya.
- 2) Beberapa informan mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara yang disampaikan oleh penulis. Kesulitan ini diakui sebagai permasalahan yang umum dan merupakan keterbatasan informan tersebut dalam mengemukakan pendapatnya secara langsung.
- 3) Keterbatasan waktu penelitian membuat penulis tidak bisa memperoleh informasi secara maksimal tentang pemekaran Desa Gemba Raya di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.

### 3. Keterbatasan Penelitian

### E. APRESIASI

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada

seluruh dosen, pengasuh, pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, khususnya Pemerintah Kecamatan Kelayan Permai dan Pemerintah Desa Gempa Raya yang telah membantu serta memberikan izin selama melakukan penelitian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Sumber Literatur:

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- 2007. *Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badjuri, Abdulkahar., dan Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik, Konsep, dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Fakultas ISIPOL Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Islamy, M. Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Luankali, Bernardus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Amelia Press.
- Moenir, H. A. S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, J. Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Patton, Michael Quinn. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Retnaningsih, Ning. Dkk. 2008. *Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Penataan Daerah dan Dinamikanya*. Percik: Salatiga.
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tohardi, Ahmad. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Pontianak: Prodi IP FISIP UNTAN.
- Wahab, Solichin Abdul. 1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Malang: Rhineka Cipta.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Dokumen dan Sumber Peraturan / Undang-Undang:**
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang. 2013. *Kecamatan Kelam Permai Dalam Angka*. Sintang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang.
- , 2012. *Kecamatan Kelam Permai Dalam Angka*. Sintang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 7 tahun 2007. Tentang pemekaran desa di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.
- Peraturan Desa Gemba Raya nomor 5 tahun 2012. Tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Gemba Raya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2006. Tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa Menjadi kelurahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005. Tentang desa.
- Profil Desa Gemba Raya tahun 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004. Tentang pemerintahan daerah.
- Skripsi:**
- Dewi, Lisa Agustina. 2012. *Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah Pada Aspek Kualitas Pelayanan di Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang*. Tirtayasa: Universitas Sultan Ageng.

Ratnasari, Neneng. 2012. *Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Melawi*. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Wijoyo, Tri Banjir Adi. 2013. *Pemekaran Desa ditinjau dari Aspek Otonomi Daerah di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur*. Makassar: Universitas Hassanuddin.

**Bahan Ajar:**

*Bahan Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif* oleh Ahmad Tohardi, 2012.

**Rujukan Elektronik:**

(<http://repository.unhas.ac.id>) di akses pada 11 Maret 2014.

(<http://sintangkab.bps.go.id>) di akses pada 26 Maret 2014.

(<http://id.wikipedia.org>) di akses pada 25 Agustus 2014.

(<http://tentangpelayananpublik.blogspot.com>) di akses pada 26 Agustus 2014.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
**PENGELOLA JURNAL MAHASISWA**

Alamat : Jl. A. Yani Pontianak, Kode Pos 78124  
Homepage : (<http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>)  
Email : ([jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id))

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai Civitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini,  
saya :

Nama Lengkap : DOROTEUS MARTYAN.  
NIM / Periode Lulus : E42010034 / 2014  
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU PEMERINTAHAN  
Email address / HP : tm07032010@gmail.com / 085750313549

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), saya menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA  
GEMBA RAYA DI KECAMATAN KELAM PERMAI  
KABUPATEN SINTANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain :

- Full text.  
 Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui / disetujui  
Pengelola Jurnal ..... 18/21 Jun 15

Dibuat di : Pontianak.  
Pada Tanggal : 19 November 2014.



  
(DOROTEUS MARTYAN)